

# PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH EKS KARISIDENAN KEDIRI

Nur Dina

Universitas Pawayatan Daha Kediri

[nurdinakdr@gmail.com](mailto:nurdinakdr@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM dalam mengakses pembiayaan dalam perbankan, memberikan informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial mengenai kelayakan usahanya. Metode penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mencari data, observasi digunakan untuk mengamati bagaimana peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM dokumentasi untuk menelusuri data seperti dokumen- dokumen lembaga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM di wilayah Karesidenan Kediri dalam pengembangan UMKM pada umumnya adalah meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga sangat mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi melalui penjagaan inflasi komoditas bahan pangan.

**Kata Kunci** : Peran Bank Indonesia, Pengembangan UMKM

## *Abstract*

*This study aims to determine the role played by Bank Indonesia in supporting the development of MSMEs in accessing financing in banking, providing banking information about potential MSMEs regarding their business feasibility.*

*This research method includes field research. The method used in this research is descriptive qualitative method. By using interview techniques, observation and documentation. Interviews were used to collect data, observations were used to observe the role of Bank Indonesia in supporting MSME development of documentation to track data such as institutional documents. Based on the results of the study, it shows that the role of Bank Indonesia in developing MSMEs in the Kediri Residency area in the development of MSMEs in general is to increase income and employment so that it is very supportive and has a strategic role in realizing equal distribution of development results and maintaining economic stability through maintaining food commodity inflation.*

## **Pendahuluan**

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bertujuan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional (Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). Selain itu, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama berupa *support*, *protection* dan *expansion* dari Bank Indonesia.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan "Pemerintah dan pemerintahan daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana dan lain-lain." Sementara pada Pasal 2 menyatakan "Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha." Dari Undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa dunia usaha seperti bank, harus berperan aktif dalam pengembangan UMKM dalam hal ini dani segi permodalan dengan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan terbesar dari perbankan, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu program yang sedang digalakkan oleh Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya yakni menjaga dan mempertahankan kestabilan mulai rupiah yakni dengan adanya "Program Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)". Diharapkan dengan adanya program ini dapat menekan laju inflasi daerah yang pada akhirnya akan berdampak kepada inflasi secara nasional.

Alasan lainnya mengapa Bank Indonesia memfokuskan program Pengembangan UMKM ini karena ternyata peran UMKM bagi perekonomian suatu negara sangatlah penting, selain sebagai penekan laju inflasi ternyata UMKM juga dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian dalam sebuah negara yaitu melalui kegiatan ekspor produk-produk nonmigas yang dapat dikatakan cukup inovatif yang akhirnya dapat menambah pemasukan atau devisa dari suatu negara (Abdul Azis, A. Herani Rusland, Peran Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2009).

Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi yang terbaik. Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain kurangnya permodalan baik jumlah mauun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran.

## **Bank Indonesia**

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebelum dinasionalisasikan bank ini bernama *De Javasche Bank* yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro (Perry Warjiyo, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK), 2018), 243).

Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut *bank to bank* dalam pembangunan penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan disektor apa pun selalu membutuhkan dana serta dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank (Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

## **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **Pengertian UMKM**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator penumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi (Sri Mulyani dan Tri Surbak Ti, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bab 1 pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari Negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu:

- a. Kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
- b. Sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan eksperimental. Pada penelitian ini, data diperoleh kualitatif dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi, Wawancara dilakukan secara langsung disaat pematerian dengan Bapak Siswanto selaku Pemateri dari Analisis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Proses wawancara dilakukan secara mendalam dengan responden karena sumber data primer pada penelitian ini adalah informasi dari beliau. Adapun dokumentasi merupakan data penunjang penelitian ini dengan mencari data dari perpustakaan BI.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh data UMKM Binaan KpwBI Kediri se-eks karesidenan Kediri yang digolongkan dalam beberapa klaster sebagai berikut :

1. Klaster cabai (Kediri)
2. Klaster bawang merah (Nganjuk)
3. Klaster telur ayam ras (Blitar)
4. Klaster kopi (Kediri & Tulungagung)
5. Klaster UMKM Unggulan yaitu Tenun Ikat Bandar Kidul (Kediri)

Berdasarkan data hasil survei produk unggulan dan potensi UMKM di wilayah Eks Karesidenan Kediri dan Madiun, seluruh kota atau kabupaten di wilayah eks karesidenan Kediri telah memiliki beberapa sentra UMKM dengan beraneka macam produk unggulan. Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah sentra UMKM sebanyak 67 sentra UMKM, antara lain: pindang ikan tongkol, tepung tapioka, gula merah, kelapa, tempe kedelai, tikar bambu, genteng, batik tulis, dan pakaian muslim. Adapun daerah lainnya seperti kota atau kabupaten Blitar, Kediri, dan Kabupaten Nganjuk memiliki sentra UMKM dengan jumlah rata-rata berkisar antara 5-22 sentra UMKM. UMKM tersebut menghasilkan beberapa produk unggulan diantaranya mebel kayu jati, kain tenun, cuka apel keripik, bubut kayu, gula kelapa, tahu, marmer, dan *handycraf* yang telah memiliki pasar baik nasional maupun interasional (Data hasil survei produk unggulan dan UMKM di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun tahun 2007).

## Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM sebelum berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 1999, peran BI dalam pengembangan UMKM bersifat langsung, dengan memberikan bantuan keuangan, berupa penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan memberikan bantuan teknis dengan mendirikan berbagai proyek pengembangan UMKM seperti, Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM).

Setelah berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 1999, peran BI berubah dari secara langsung menjadi tidak langsung yang berkaitan dengan pengembangan UMKM relatif terbatas dan bersifat tidak langsung, yaitu melalui kebijakan kredit perbankan dan pemberian bantuan teknis secara terbatas. Pendekatan yang digunakan kepada UMKM bergeser dari *development role* menjadi *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan oleh petugas bank, penelitian dan penyediaan informasi.

Dengan kondisi ini, BI masih tetap memberikan dukungan, namun kebijakan BI baik dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand* lebih difokuskan dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat. Dari sisi *supply*, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan sehingga dapat meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM namun tetap prudent. Dari sisi *demand*, kebijakan Bank Indonesia lebih difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.

Strategi pengembangan UMKM di lingkungan Bank Indonesia dimaksudkan untuk mencapai sasaran wujudnya pengembangan UMKM yang mendukung pencapaian kebijakan utama Bank Indonesia melalui dua instrumen kebijakan yaitu :

- a. Kebijakan makropudensial, dengan indikator utama, 1) jumlah kinerja, dan kesinambungan program yang mendukung stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian bahan pangan yang tenan (*volatile food*) maupun, penganeekaragaman pengembangan ekonomi produktif (UMKM Unggulan); 2) komponen ekosistem UMKM, rasio kredit UMKM yang tergambar dari terwujudnya UMKM yang berkualitas dan berkembang berkelanjutan, dan
- b. Kebijakan sistem pembayaran, dengan indikator utama, 1) penggunaan transaksi elektronik di lingkungan UMKM secara lebih luas; 2) penguatan kerjasama kelembagaan melalui penguatan koordinasi internal-eksternal dan penguatan komitmen nasional dalam pengembangan UMKM.

### **Peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM di wilayah Eks Karesidenan Kediri.**

Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengembangkan UMKM. Mengingat UMKM merupakan salah satu peran penting dalam perekonomian operasional. Peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM yaitu dalam mengakses pembiayaan dalam

perbankan, memberikan informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial atau mengenai kelayakan usahanya.

Peran Bank Indonesia dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Karesidenan Kediri yaitu pada umumnya berkemampuan meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, Bank Indonesia sangat berperan dalam pengembangan UMKM ini. Dalam melaksanakan perannya, Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisien terkait dengan pembinaan kepada UMKM.

Sebagai upaya mendorong pengembangan UMKM, Bank Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Peningkatan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan melalui penguatan infrastruktur keuangan.
- b. Peningkatan *expertise* perbankan tentang UMKM.
- c. Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster (sentra bisnis) yang terdiri dari klaster nasional dan daerah.
- d. Penyediaan informasi mengenai UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan informasi antara perbankan dan UMKM dalam rangka mendorong pemberian kredit UMKM oleh perbankan.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Indonesia (BI) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tugas BI dalam menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi melalui terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih *supply*. Selain itu, untuk mendukung tugas BI dalam stabilitas keuangan seimbang serta kendala sistem pembayaran melalui dukungan terhadap penggunaan rupiah dan pemanfaatan elektronik pembayaran.

Pengembangan UMKM dilakukan dengan dua strategi utama, yakni mendorong penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan dan peningkatan ekonomi UMKM. Salah satu program utama yang dilakukan BI dalam peningkatan kapasitas ekonomi UMKM adalah pengembangan klaster. Dalam hal ini, pengembangan klaster ditujukan terhadap komoditas pendukung ketahanan pangan dan menjaga inflasi. Klaster merupakan sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor atau sub-sektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan dari hulu ke hilir yaitu mulai dari budi daya, pengelolaan dan pasar. Klaster mulai dikembangkan BI pada tahun 2006 yang selanjutnya dilakukan oleh hampir seluruh kantor perwakilan dalam negeri dengan komoditas yang didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Kriteria pemilihan klaster berdasarkan komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi maupun komoditas unggulan di masing-masing wilayah.

Dalam implementasinya, melalui pendekatan klaster yang merupakan upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung dan terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga terkait, diharapkan perusahaan atau industri terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika bekerja sendiri.

Sejak tahun 2014, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri telah membina dan mengembangkan berbagai klaster. Bermula pemilihan klaster adalah atas permintaan kelompok-kelompok petani dan komoditas ekspor untuk memfasilitasi dan intermediasi untuk dapat mengembangkan usahanya. Dengan potensi yang ada, KpwBI Kediri melalui program kerja klaster mengembangkan berbagai dengan kelompok-kelompok binaan seperti klaster cabe (Kediri), bawang merah (Nganjuk), telur ayam ras (Blitar) dan kopi (Tulungagung).

Beberapa titik kritis dalam program hilirisasi klaster antara lain:

- a. Aspek Kelembagaan Kelompok Tania tau Gabungan Kelompok Tani: menuju peningkatan peran lembaga secara optimal yang dikelola secara profesional (dalam bentuk koperasi dan atau perusahaan terbatas)
- b. Aspek Kapasitas Produksi: meningkatkan ketersediaan komoditas dan produk olahan secara berkelanjutan.
- c. Aspek Pasar: mencakup informasi peluang dan peningkatan volume pemesanan kembali (*reorder*) yang lebih tinggi
- d. Fungsi *champion* (perusahaan pioner) dalam program hilirisasi klaster adalah pengembangan pengelolaan komoditas dalam bentuk produk turunan; fasilitas pemasaran hasil komoditas produk hasil pengolahan baik riel, maupun melalui *e-commerce*, dan sebagai *off-taker* dan atau penjamin Lembaga atau petani.
- e. Dan lain-lain.

Selain klaster bahan pangan yang rentan, Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal berupa pengembangan klaster UMKM Unggulan. Tema pengembangan UMKM Unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal adalah sebagai berikut :

1. Daerah perbatasan tertinggal
2. Pemberdayaan perempuan
3. Nelayan
4. Industri kreatif
5. Komoditas ekspor atau substitusi impor

Berdasarkan tema tersebut, komoditas kopi di wilayah Kab. Tulungagung dan Kab. Kediri dipilih untuk kesesuaian dengan tema ke-5 (komoditi ekspor atau substitusi impor). Namun tidak tertutup untuk mengembangkan komoditi lain yang sesuai dengan salah stau pilihan tema tersebut. Sebagaimana komoditi Tenun Ikat (Industri Kreatif) dan tema ke-2 (Pemberdayaan perempuan) kaena sektor ini lebih memberdayakan peran perempuan dalam aktivitas produksinya

Pilihan strategi yang dapat ditempuh untuk program pengembangan UMKM Unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal adalah melalui:

- a) Pengembangan usaha komoditas, mencakup aktivitas sebagai berikut:
  - 1) Mendorong tumbuhnya usaha baru
  - 2) Mempertahankan usaha,
  - 3) Memperluas/mengembangkan usaha,
  - 4) Mendorong inovasi.
  - 5) Mendorong kewirausahaan.
- b) Pengembangan ekonomi komunitas, mencakup aktivitas sebagai berikut :
  - 1) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelaksanaan pelatihan, magang dan lain-lain.

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 3) Meningkatkan partisipasi segmen masyarakat tertentu dalam kegiatan ekonomi produktif.

Adapun proses pendampingan UMKM Binaan Bank Indonesia dilakukan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang jika UMKM Binaan tersebut belum bisa mandiri. Prosedur pendampingan Bank Indonesia antara lain:

- a. Cluster Binaan tersebut merupakan kelompok atau lembaga, bukan perorangan, misalnya Gapoktan, KUB, dan lain-lain.
- b. Bank Indonesia melakukan identifikasi bantuan teknis atau pelatihan apa yang dibutuhkan oleh cluster binaan tersebut.
- c. Bank Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan maupun peralatan pendukung yang dibutuhkan cluster binaan untuk meningkatkan kualitas produksinya.
- d. Ketika produksi sudah bagus, maka pendampingan selanjutnya adalah dengan mendorong pemasarannya dengan mengikutkan cluster binaan ke pameran-pameran.
- e. Ketika produksi dan pemasaran sudah sesuai harapan, maka pendampingan selanjutnya adalah pemberian alat-alat produksi yang modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksinya.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai peran BI dalam pengembangan UMKM di wilayah Karesidenan Kediri yaitu peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM pada umumnya adalah meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga sangat mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi melalui penjagaan inflasi komoditas bahan pangan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran dalam upaya pengembangan UMKM, adalah diharapkan Bank Indonesia dalam berbagai kebijakan untuk semakin memajukan UMKM terutama terkait permodalan dan pembiayaan serta semakin meningkatkan pengembangan UMKM dari sisi bantuan teknis dan pelatihan agar produksinya meningkat.

### **Daftar Pustaka**

*Abdul Azis, A. Herani Rusland, Peran Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2009).*

Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 4.



www.depkop.go.id Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 2014.

Materi yang disampaikan oleh Bapak Siswanto selaku pemateri dari Analisis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM.

Sri Mulyani dan Tri Surbakti, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 233-235.

Nusron Wahid, Keuangan Inklusif. Membongkar Hegemoni Kevangm (Jakarta: Kepustakaan populer Grainedia, 2014), 175.

Ishworo Widyanto, Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia: Implementasi dan Kendalanya, 1-4.

Abdul Aiz dan A Herali Rusland, Peranan Bank Indonesia., 10-13.

Data hasil survei produk unggulan dan UMKM di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun tahun 2007 [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)